

RENCANA KERJA
RENJA 2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis periode 2025 – 2029 umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Rencana Kerja tahun 2026 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada Renja periode 2025 juga direncanakan program kegiatan berkesinambungan sesuai yang dirumuskan pada RENSTRA 2025-2029 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

Semoga dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini, seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. MUH. YUSUF, ST., M.Eng

Pangkat : Pembina

Nip 198106112000031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 01

 I.1 LATAR BELAKANG 01

 I.2 LANDASAN HUKUM 03

 I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 05

 I.4 SISTEMATIKA PENULISAN 06

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 08

 II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA 08

 II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 27

 II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI . 30

 II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 31

 II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT 45

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIA..... 68

 III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 69

 III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA 70

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 72

 IV.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 72

BAB V PENUTUP 93

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, lokasi, kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program Pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2026

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng

Rappangyang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pemabangunan jangka Menengah Daerah (RPjMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan Pembangunan bidang Lingkungan Hidup, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Semenr (KUA-PPAS)

Adapun keterkaitan Renja Perangkat daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidal dapat dipisahkan karena di dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atas seperti RPJMD, Renstra Perangkat daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang dibuat ini akan mampu memberikan Gambaran tentang Rencana Kinerja yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana kita ketahui pemanfaatannya harus diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat, dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian Lingkungan Hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta dapat memberikan Gambaran yang menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama 1 (satu) Tahun pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan Peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya dan tersusunnya Dokumen Perencanaan dibidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi , arah kebijakan, program yang lebih efektif dan efesien
2. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mampu menopang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 atau sumber dana lainnya.
3. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik dan seimbang. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber dayaalam serta terwujudnya penataan hukum di bidang lingkungan hidup yang tertib baik terhadap masyarakat, dunia uah, serta pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.3 Sistematika Penyusunan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah..

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 meliputi 3 (Tiga) hal, yaitu rumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
2. Tujuan yang dikehendaki
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai entrypoint dalam penyusunan perencanaan tahun 2025
- b) Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- c) Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 yang terdiri dari program dan kegiatan telah mencapai keberhasilan pada beberapa kegiatan,

meskipun demikian juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target maksimal sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 12.490.286.390,-** atau sebesar **Rp. 94 %** dari total anggaran sebesar **Rp. 13.600.091.000,-** dengan rincian Belanja Operasional dengan total anggaran sebesar **Rp. 13.361.411.000** dengan rincian belanja pegawai sebesar **Rp. 333.598.626.000,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 3.598.626.000,-** sedangkan Belanja Modal sebesar **Rp. 238.680.000,-**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN INI	REALISASI KEUANGAN S/D DESEMBER		REALISASI FISIK S/D DESEMBER	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN	852.860.000	851.760.000	100	851.760.000	100
	BELANJA TOTAL	11.567.382.900	10.675.864.014	94	10.675.864.014	94
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.598.626.000	3.540.009.154	99	3.540.009.154	99
5.1.01.01	Belanja Gaji	2.971.845.000	2.937.135.070	99	2.937.135.070	99
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	580.781.000	580.775.147	100	580.775.147	100
5.1.01.03	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.000.000	22.098.937	48	22.098.937	48
					-	
2,11	BELANJA LANGSUNG	7.968.756.900	7.135.854.860	90	7.135.854.860	90
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.277.447.100	1.174.449.072	92	1.174.449.072	92

	Daerah Kabupaten/Kota					
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.721.000	27.782.510	76	27.782.510	76
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.045.200	21.998.313	56	21.998.313	56
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.489.500	530.449.548	100	530.449.548	100
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.998.300	100	34.998.300	100
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	410.342.400	399.277.611	97	399.277.611	97
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.849.000	159.942.790	71	159.942.790	71
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	87.835.000	84.870.000	97	84.870.000	97
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	87.835.000	84.870.000	97	84.870.000	97
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	58.929.500	52.812.669	90	52.812.669	90
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	28.929.500	23.862.446	82	23.862.446	82
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau	30.000.000	28.950.223	97	28.950.223	97

	<i>Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>					
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.779.831.000	1.590.062.300	89	1.590.062.300	89
2.11.04.2.01	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	1.779.831.000	1.590.062.300	89	1.590.062.300	89
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	35.864.500	34.560.625	96	34.560.625	96
2.11.05.2.01	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	11.897.000	10.960.500	92	10.960.500	92
2.11.05.2.02	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.967.500	23.600.125	98	23.600.125	98
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	36.814.000	34.613.300	94	34.613.300	94
2.11.06.2.01	<i>Pembinaan dan pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	36.814.000	34.613.300	94	34.613.300	94
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5.652.500	4.371.608	77	4.371.608	77
2.11.07.2.01	<i>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang</i>	5.652.500	4.371.608	77	4.371.608	77

	<i>terkait dengan PPLH</i>					
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	99.610.500	79.637.513	80	79.637.513	80
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.610.500	79.637.513	80	79.637.513	80
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.748.500	8.644.900	89	8.644.900	89
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	9.748.500	8.644.900	89	8.644.900	89
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	4.577.024.300	4.071.832.873	89	4.071.832.873	89
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.577.024.300	4.071.832.873	89	4.071.832.873	89

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp. 36.721.000,- dengan realisasi Rp. 27.782.510,-
- b. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 23.522.600,- dengan realisasi Rp. 21.998.313,-

- c. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp. 531.489.500,- dengan realisasi Rp. 530.449.548,-
- d. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi Rp. 34.998.300,-
- e. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran Rp. 34.451.000,- dengan realisasi Rp. 29.147.850,-
- f. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp. 144.128.000,- dengan realisasi Rp. 89.008.940,-
- g. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp. 18.270.000,- dengan realisasi Rp. 14.251.000,-
- h. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 28.000.000,- dengan realisasi Rp. 27.535.000,-

- i. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPL) Kabupaten/kota dengan sub kegiatan penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 87.835.000,- dengan realisasi Rp. 84.870.000,-
- j. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan anggaran Rp. 9.962.000,- dengan realisasi Rp.8.579.000,-
- k. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dengan anggaran Rp. 18.967.500,- dengan realisasi Rp.15.333.223,-
- l. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan anggaran Rp. 12.128.500,- dengan realisasi Rp.11.530.531,-
- m. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan anggaran Rp. 17.871.500,- dengan realisasi Rp.17.419.692,-
- n. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

dengan anggaran Rp. 1.779.831.000,- dengan realisasi Rp.1.590.062.300,-

- o. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dengan sub kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 dengan anggaran Rp. 11.897.000,- dengan realisasi Rp.10.960.500,-
- p. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dengan sub kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 dengan anggaran Rp. 11.897.000,- dengan realisasi Rp.10.960.500,-
- q. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota dengan sub koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan dengan anggaran Rp23.967.500,- dengan realisasi Rp.23.600.125,-
- r. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota dengan sub koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan dengan anggaran Rp23.967.500,- dengan realisasi Rp.23.600.125,-

- s. Program pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dengan anggaran Rp 15.000.000,- dengan realisasi Rp.12.799.300,-
- t. Program pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dengan anggaran Rp 15.000.000,- dengan realisasi Rp.12.799.300,-
- u. Program pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kotadengan anggaran Rp 21.814.000,- dengan realisasi Rp.21.814.000,
- v. Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) , kearifan local dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan kegiatan pengakuan MHA, kearifan local, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local dengan anggaran Rp 5.652.500,- dengan realisasi Rp.4.371.608,-

- w. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan kegiatan pemberian penghargaan penilaian kinerja masyarakat kabupaten/kota dengan sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Rp anggaran Rp 99.610.500,- dengan realisasi Rp.79.637.513,-
 - x. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan kegiatan pemberian penghargaan penilaian kinerja masyarakat kabupaten/kota dengan sub kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota dengan anggaran Rp 9.748.500,- dengan realisasi Rp.8.644.900,-
 - y. Program Pengelolaan persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub kegiatan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali dengan anggaran Rp 2.048.230.700,- dengan realisasi Rp. 1.814.931.836,-
 - z. Program Pengelolaan persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampai di TPA/TPST/SPA dengan anggaran Rp 4.320.035.300,- dengan realisasi Rp. 3.864.944.973,-
 - aa. Program Pengelolaan persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota dengan anggaran Rp 256.989.000,- dengan realisasi Rp. 3.206.887.900,-
- 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah

daerah dengan sub kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp. 36.721.000,- dengan realisasi Rp. 27.782.510,-

- b. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 23.522.600,- dengan realisasi Rp. 21.998.313,-
- c. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp. 531.489.500,- dengan realisasi Rp. 530.449.548,-
- d. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi Rp. 34.998.300,-
- e. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran Rp. 34.451.000,- dengan realisasi Rp. 29.147.850,-
- f. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp. 144.128.000,- dengan realisasi Rp. 89.008.940,-
- g. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin

lainnya dengan anggaran Rp. 18.270.000,- dengan realisasi Rp. 14.251.000,-

- h. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 28.000.000,- dengan realisasi Rp. 27.535.000,-
- i. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPL) Kabupaten/kota dengan sub kegiatan penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 87.835.000,- dengan realisasi Rp. 84.870.000,-
- j. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan anggaran Rp. 9.962.000,- dengan realisasi Rp.8.579.000,- atau 11,33%.
- k. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dengan anggaran Rp. 18.967.500,- dengan realisasi Rp.15.333.223,- atau 20.24%.
- l. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan anggaran Rp. 12.128.500,- dengan realisasi Rp.11.530.531,- atau 19.03%.

- m. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan anggaran Rp. 17.871.500,- dengan realisasi Rp.17.419.692,- atau 05%
- n. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan anggaran Rp. 1.779.831.000,- dengan realisasi Rp.1.590.062.300,- atau 18,32%
- o. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dengan sub kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 dengan anggaran Rp. 11.897.000,- dengan realisasi Rp.10.960.500,- atau 31,15%
- p. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dengan sub kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 dengan anggaran Rp. 11.897.000,- dengan realisasi Rp.10.960.500,- atau 44,32%
- q. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota dengan sub koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan dengan anggaran Rp.23.967.500,- dengan realisasi Rp.23.600.125,- atau 33,32%

- r. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota dengan sub koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan dengan anggaran Rp23.967.500,- dengan realisasi Rp.23.600.125,- atau 9.62%
- s. Program pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dengan anggaran Rp 15.000.000,- dengan realisasi Rp.12.799.300,- atau 18.60%
- t. Program pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kotadengan anggaran Rp 21.814.000,- dengan realisasi Rp.21.814.000,- atau 20.45%
- u. Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) , kearifan local dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan kegiatan pengakuan MHA, kearifan local, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local dengan anggaran Rp 5.652.500,- dengan realisasi Rp.4.371.608,-

- v. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan kegiatan pemberian penghargaan penilaian kinerja masyarakat kabupaten/kota dengan sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Rp anggaran Rp 99.610.500,- dengan realisasi Rp.79.637.513,-
 - w. Program Pengelolaan persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub kegiatan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali dengan anggaran Rp 2.048.230.700,- dengan realisasi Rp. 1.814.931.836,-
 - x. Program Pengelolaan persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampai di TPA/TPST/SPA dengan anggaran Rp 4.320.035.300,- dengan realisasi Rp. 3.864.944.973,-
 - y. Program Pengelolaan persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota dengan anggaran Rp 256.989.000,- dengan realisasi Rp. 3.206.887.900,-
- 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.
- 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Program dan kegiatan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan seluruhnya dan beberapa kegiatan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan terutama pada kegiatan yang

bersifat rutin. Kendatipun demikian juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi sesuai target.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja program/kegiatan disebabkan oleh :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pekerjaan lingkungan hidup di awal tahun
2. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu melakukan kontrol dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan
4. Kinerja yang baik dari seluruh staf dinas dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan

Adapun kegiatan yang tidak berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan disebabkan oleh :

- Waktu pelaksanaan yang mendekati akhir tahun sehingga timbul kekhawatiran anggaran tidak dapat dicairkan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2025 yaitu :

- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
- b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan kegiatan dalam DPA berorientasi kepada pencapaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan
- b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2024 serta target tahun 2025 adalah sebagaimana pada *Tabel 2.1* Sebagai berikut :

Tabel T-C. 29A1:K1A1:K17
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD Lembar	: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan : 1 dari 15 Halaman									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan Renja tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100,00	100,00	1
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100,00	100,00	1
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	4	4	4	4	1	4	4,00	1
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1,00	1
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	1	2	2,00	1
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1,00	0
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	2	1	2	2,00	1
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtishar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	4	4	1	4	4,00	1

2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100		100	100	462,22%	100	200,00	2
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560	560	560	560	1	560	560,00	1
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	1,00	1
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	1	2	2,00	1.6
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum	100	100	100	100	17,75%	100,00	100,00	1
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	4	4	4	1	4	4,00	1
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	180	180	180	1	180	180,00	1
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	0,00%	16,67	16,67	0,17
2.11.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	2	2	2	1	23,00	23,00	11,5
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	50,97%	1	1,00	0,01
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	414	414	414	414	1	414	414,00	1
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	12	12	1	12	12,00	1
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1	12	12,00	1,00

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Adapun indikator kinerja kinerja yang menjadi tolak ukur kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode tiga tahun sebagaimana tertera pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 adalah indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
5. Pengembangan system informasi Lingkungan Hidup;
6. Pemberian izin lingkungan;
7. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan/kebersihan beserta pembiayaan mulai dari tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah;
8. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum analisa kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel T-C.30 :

TABEL T C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			57,08%	73,36	63,26%	64,91%	65,48%	66,53	62,63	62,56	66,55		
2	Indeks Kualitas Air			38,34%	58,40%	60%	62,25%	62,27%		58,4	58,3	54		
3	Indeks Kualitas Udara			87,86%	84,77%	85,20%	88,30%	90%		84,77	84,7	87,9		

4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			48,06%	49,19%	49,25%	49,37%	49,50%		49,19	49,15	48,63		
5	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			-	-	40%	60%	80%				100%		
7	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan			15%	16,36%	17,64%	20%	20%				100%		
8	Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			-	-	70%	89%	92%				100%		

9	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			-	-	87%	87%	90%				100%		
10	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			-	-	65,07%	85,10%	90%				100%		
11	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup			100%	100%	100%	100%	100%				100%		
12	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%				100%		
13	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota			62%	65,1	67,4	69,2	72,5				100%		

No	Indikator		IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
----	-----------	--	-----	---------------------------------	--	--	--	-------------------	----------	------------------

		SPM/standar nasional		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	
1	2	3		5	6	7			9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,62	0,00	100,00	100,00	
2	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			11,94	13,44	14,93	16,43	17,92	19,42	89,70	0,00	13,44	14,93	
3	Persentase Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/ perkotaan			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	89,34	50,00	30,00	30,00	
4	Persentase Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,36	0,00	100,00	100,00	
5	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,50	0,00	100,00	100,00	
6	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	77,34	0,00	100,00	100,00	
7	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79,95	0	100,00	100,00	

8	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,68	-	100,00	100,00	
9	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota			78,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,95	18.63	82,00	83,00	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya, maka Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup (Kualitas Tanah, Udara dan Air)
2. Ancaman Penurunan Keanekaragaman Hayati
3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Keterbatasan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan
Keterbatasan Tempat Pembuangan Sampah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun
6. Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
7. Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
9. Program Penanganan pengaduan lingkungan dengan hidup alokasi anggaran pada rancangan akhir RKPD
10. Program Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran pada rancangan akhir RKPD

Perbandingan antara rancangan awal Program dan kegiatan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini (T-C.31.):

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Sidenreng Rappang
Lembar : 1 dari 7 Halaman

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	Bidang Lingkungan Hidup				Bidang Lingkungan Hidup					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32.200.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Perencanaan , Penganggaran dan Capaian Kinerja	100%	32.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	32.200.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.700.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.700.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100%	3.959.475.425	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100%	3.959.475.425	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Org/bln	3.941.775.425	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Org/bln	3.941.775.425	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.500.000	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.700.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumem	2.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumem	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	-	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan pelayanan Administrasi Umum	100%	203.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Cakupan Ketersediaan pelayanan Administrasi Umum	100%	203.500.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	3.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	200.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	454.140.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	454.140.500	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	4.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	4.000.000	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	Pengadaan Alat Besar	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000	
Pengadaan Gedung kantor ataaau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dfisediakan	1 Unit	0	Pengadaan Gedung kantor ataaau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dfisediakan	1 Unit	0	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	4.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	4.000.000	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	Pengadaan Alat Besar	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000	
Pengadaan Gedung kantor ataau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dfisediakan	1 Unit	0	Pengadaan Gedung kantor ataau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dfisediakan	1 Unit	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	454.140.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	454.140.500	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.100.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.100.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.040.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.040.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	375.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	375.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	288.970.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	288.970.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	133.970.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	133.970.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Unit	5.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	15.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	178.758.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	178.758.000	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/kota	100	168.758.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/kota	100	168.758.000	
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH kabupaten/kota	1 Dokumen	168.758.000	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen RPPLH kabupaten/kota	1 Dokumen	168.758.000	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/kota	100	10.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/kota	100	10.000.000	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000	

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Ruang Terbuka Hijau Kanupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	5.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen KLHS Ruang Terbuka Hijau Kanupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	5.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	13.44	100.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	13.44	100.000.000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	75.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	75.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	25.000.000	
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2 Lokasi	15.000.000	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Sidenreng Rappang	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2 Lokasi	15.000.000	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2 Paket	20.000.000	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2 Paket	20.000.000	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	15.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	15.000.000	

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	100	25.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	25.000.000	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	10.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	10.000.000	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	12 Titik	15.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	12 Titik	15.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati yang lestari	30%	1.750.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kabupaten Sidenreng Rappang	Terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati yang lestari	30%	1.750.000.000	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	100%	1.750.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase RTH kawasan perkotaan	100%	1.750.000.000	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	50 Ha	1.750.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Sidenreng Rappang	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	50 Ha	1.750.000.000	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten//kota	1	30.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kabupaten Sidenreng Rappang	Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten//kota	1	30.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Persentase Pengurangan Limbah B3	100	43.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Pengurangan Limbah B3	100	43.000.000	
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3	100	20.000.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Jumlah usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3	100	20.000.000	

Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yaang dilakukan	6 Usaha	20.000.000	Verifikasi Lapangan uuntuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	6 Dokumen	20.000.000	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	100	23.000.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Limbah B3 dalam satu daerah	100	23.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintahan Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	6 Dokumen	23.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintahan Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	6 Dokumen	23.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	47.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	47.000.000	

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	100	47.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	100	47.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis persetujuan lingkup, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	7 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis persetujuan lingkup, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	7 Dokumen	10.000.000	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha	37.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah laporan hasil usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkup surat kelayakan operasi dan pemerintah daerah kabupaten/kota	35 Badan Usaha	37.000.000	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	10.000.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kabupaten Sidenreng Rappang	Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	10.000.000	

Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi tentang kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	10.000.000	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi tentang kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	10.000.000	
Koodinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	10.000.000	Koodinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	10.000.000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	100	37.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	100	37.000.000	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	100	37.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100	37.000.000	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat lembaga masyarakat dunia /usaha dunia/pendidikan /filantropi yang dunia kinerja dalam rangka PPLH	8 Entitas	37.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah masyarakat lembaga masyarakat dunia /usaha dunia/pendidikan /filantropi yang dunia kinerja dalam rangka PPLH	8 Entitas	37.000.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100	25.502.500	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100	25.502.500	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	25.502.500	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	25.502.500	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/dikelola	15 Pengaduan	25.502.500	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/dikelola	15 Pengaduan	25.502.500	

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	47.65	10.257.194.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	47.65	10.257.194.000	
Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah	100	10.257.194.000	Pengelolaan Sampah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah	100	10.257.194.000	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	20.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	20.000.000	
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan si TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	2 Unit	4.442.252.000	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan si TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	2 Unit	4.442.252.000	
Penyusunan Rencana kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan diterapkan	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Rencana kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan diterapkan	2 Dokumen	20.000.000	
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	27,021,25 Ton	3.000.000.000	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	27,021,25 Ton	3.000.000.000	
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	88 Persen	10.000.000	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	88 Persen	10.000.000	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	9260,02 Ton	1.779.942.000	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	9260,02 Ton	1.779.942.000	

Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	7 Laporan	10.000.000	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	7 Laporan	10.000.000	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	38,5 Ton	975.000.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kabupaten Sidenreng Rappang	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	38,5 Ton	975.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DINAS Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025, kemudian menjadi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026.

Usulan Program dan kegiatan kemudian menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas lingkungan Hidup ditet Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi SKPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Masyarakat khususnya terkait dengan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas LH sepanjang anggaran mampu terakomodir dan mampu memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Dalam usulan Musrenbang tahun ini, masyarakat umumnya mengusulkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dan hal ini juga didukung oleh sebagian besar hasil reses DPRD Kab. Sidenreng Rappang. Adapun daftar usulan Musrenbang, hasil Reses DPRD dan usulan Prioritas SKPD secara lengkap tercantum dalam tabel T-C.32

TABEL TC – 32
DAFTAR POKOK - POKOK PIKIRAN ANGGOTA DPRD DAN REKAPITULASI USULAN ASPIRASI MASYARAKAT
(MUSREMBANG)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	VOLUM E	SATUA N	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	Syamsul Bahri, ST	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Banyak masyarakat membuang sampah di sembarang tempat	Lingkungan 1 Barukku, Lingkungan 2 Salopalakka, Lingkungan 4 Bolabulu, dan Lingkungan 5 Labobo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2	Syamsul Bahri, ST	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Banyak sampah yang bertumpuk (Butuh mobil untuk mengangkut sampah)	Kelurahan Batu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

3	Syamsul Bahri, ST	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Banyak sampah yang bertumpuk (butuh bank pembuangan sampah)	Jl. Kemakmuran (SMA 9 SIDRAP) Lingkungan 1 barukku, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
4	hasbi kadir	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Mobil Sampah	DESA KANIE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
5	ANDI ASLINDAH, S.Sos	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Kelurahan Macorawalie, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
6	RIJAL MU"MINSYAH, S.Pd	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Masyarakat masih membuang sampah sembarangan (Mobil pengangkut sampah 1 Unit dan bak tempat pembakaran sampah 200 unit)	Desa Dengeng-Dengeng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

7	JAMALIAH PODDING	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Motor Pengangkut Sampah Kelurahan Kadidi	Kelurahan Kadidi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	2	Unit	110000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
8	GUSRIANA AGUS	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Tidak adanya kontainer sampah untuk pasar lawawoi	LINGK I PALLA BESSIE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	2	unit	160000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
9	SURYADI ANDI	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	[Pembuatan Bak Sampah rumah tangga] Pencemaran lingkungan, Menyebabkan Banjir	Dusun1, Dusun 2 dan Dusun 3, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	1	unit	80000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

10	ANDI MIRAJE KASIM	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Masih Banyaknya masyarakat membuang sampah sembarangan/selokan sehingga dapat mengakibatkan banjir dan menimbulkan penyakit dan sudah memiliki mobil sampah namun segi operasional dibutuhkan Bantuan Modal Operasional Mobil Sampah dengan Anggaran Sekitar Rp. 300.000.000 (Dinas Lingkungan Hidup)	Dusun Bendoro, Dusun Lasilottong dan Dusun Baramming, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
----	----------------------	---	---	--	------------------------	-----------------	---	------	-----------	--

11	FADILAH	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah atau Sarana Pengangkut Sampah (gerobak, motor, atau mobil sampah). (Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah karena kurangnya fasilitas pendukung)	Desa Abbokongang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
12	Mukhsanah	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Motor Sampah	TPS 3R, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	2	Unit	110000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

13	A.MARIANI	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Karena banyaknya sampah yang sudah di kumpulkan masyarakat terutama sampah plastik yang akan diolah menjadi daur ulang namun tempat penampungannya tidak memadai , maka diperlukan PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R	Dusun IV, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	700000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
14	RAHMAN, S.I.P	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	kurangnya angkutan atau kendaraan yang mengangkut sampah di rumah-rumah warga sehingga sering terjadi penumpukan sampah.	Kelurahan lalebata, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

15	ANDI HERLINA,S.Sos.M .ap	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Banyak sekali sampah yang bertumpuk di pinggir jalan karena tidak adanya pengangkutan sampah.	Kelurahan Tanrutedong, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
16	herni	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Banyaknya sampah di pekarangan dan jalan desa sehingga membutuhkan Motor Sampah (Motora) untuk mengangkut sampah-sampah masyakarat sebanyak 1 Unit	Wanio Timoreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	1	unit	550000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

17	Kelurahan Kanyuara	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Kontainer Sampah (Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah) yang Berlokasi Di Lingkungan I Kanyuara Dengan Jumlah 1 Paket (Mobil Pengangkutan Dan Bak Sampah) Dengan Perkiraan Biaya Rp. 270.000.000 Yang Bersumber dana Ditujukan Kepada Dinas Lingkungan Hidup.	Lingkungan I Kanyuara, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
18	Abbas	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat karena bak sampah dan pengangkutan sampah	Dusun I Kampung Baru dan Dusun II Amesangeng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

19	SAHRUNI	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Perlunya Pengadaan Mobil Sampah ,	DESA CARAWALI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
20	DIAN MEGAWATI NUR	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (Pengelolaan Sampah kompos untuk rumah tangga)	majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Unit	50000000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
21	Muhammad Saharuddin	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Armada Sampah Roda 6 1 Unit	Desa Lagading, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
22	Muhammad Saharuddin	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Armada Sampah Roda 3 5 Unit	Desa Lagading, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	5	unit	55000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
23	HASNIAR	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pencemaran Lingkungan	Banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai dan lahan perkebunan yang bukan miliknya	DESA BUAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

24	TRIYANA WINDA	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pembersihan dan Pengerukan Saluran	Jalan Landaung sampai dengan Jalan Rusa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Paket	20000000	Penanganan sampah melalui pengangkutan
25	TRIYANA WINDA	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pembersihan dan Pengerukan Saluran	Jalan Singa di Belakan Masjid Ar-Rahman, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Paket	20000000	Penanganan sampah melalui pengangkutan
26	TRIYANA WINDA	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengambilan Sampah secara Menyeluruh	Lautang Benteng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
27	Abbas	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan bak sampah dan mobil sampah	Dusun I Kampung Baru dan Dusun II Amessangeng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
28	ASRUL	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pembangunan Bak Sampah Poskesdes dan Masyarakat Desa,	Dusun VI Bola Bulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	80000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

29	Desa Aka-akae	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Perlunya pengadaan Armada angkutan Sampah	Dusun I Aka-Akae dan Dusun II Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	65000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
30	Desa Aka-akae	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Tidak adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disembarang tempat maka dari itu sangat dibutuhkan untuk pengadaan tempat sampah	Dusun I Aka-Akae dan Dusun II Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	80000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
31	hasnaini	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Masih Banyaknya Masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. dan perlunya pengadaan TPS	Jalan Masuk Desa Lise Dusun Sukeppe , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	80000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

32	ANUGRAH SALEH	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kerusakan Lingkungan	Penghijauan Perlu Dilakukan Disepanjang Jl. Andi Cammi Untuk Menyediakan Lingkungan Sehat Untuk Aktivitas Diluar Rumah	Jl. Andi Cammi Dusun I dan Dusun II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Paket	20000000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
33	ANDI RISWANDI S.IP	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Motor Sampah	Lingkungan I dan II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	55000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
34	SURIYATI RESSANG	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Motor Sampah	Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	55000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
35	Annisa Mandayani	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Kelurahan Baranti	Kelurahan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Paket	50000000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

36	SURIYATI RESSANG	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Rumah Kompos	Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	550000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
37	SURIYATI RESSANG	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R	Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
38	SURIYATI RESSANG	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilah Sampah Sederhana (Bak Sampah)	Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	800000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
39	DARMAWATI	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pencemaran Lingkungan	Pengadaan Motor Sampah Kelurahan Manisa Sebanyak 2 Unit Sekitaran Biaya Rp, 75.000.000,-	SeKelurahan Manisa Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	2	unit	550000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
40	DESA SALOBUKKANG	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	kebiasaan warga membuang sampah sembarangan	Desa Salobukkang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Paket	500000000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

41	MARIATY	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	belum ada kendaraan operasional pengangkutan sampah di Desa	Desa Tonrongnge, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
42	TUSRI HADI	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Kurang Bak sampah di Desa Menyebabkan masalah sampah di Desa tidak bisa terselesaikan dan masyarakat membuang sampah disembarangan tempat	Jl.Poros Rappang-Pinrang Dusun Padacenga Rijang dan Dusun Simpo, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
43	TUSRI HADI	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Sangat diperlukan pengadaan mesin pengayak kompos, container dan kendaraan roda 4 TPS3R	Dusun Baranti Wattang (Pasar Baranti TPS3R), Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	3	unit	500000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

44	A.MARIANI	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Ada pengurus yang masih baru sehingga memerlukan bimbingan dalam pengelolaan administrasi tentang Unit Sampah sehingga memerlukan PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH UNIT BERLIANG	Desa Kalosi Alau , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
45	ANDI MANGKAU, S.Sos	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Tidak adanya Pusat Pembuangan Sampah di wilayah Kelurahan Lawawoi	Lingkungan 1 Lawawoi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
46	HAEDAR	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Masyarakat Membuang Sampah ditepi sungai sehingga dapat mengakibatkan banjir	Desa Tonrong Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
47	Daryani T	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	tidak ada pengelolaan sampah	desa sereang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

48	ANDI RISMA KARTIKA SIDIK	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Di butuhkan alat pengangkutan persampahan	LK 1 dan LK II , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
49	FERY. M, SH	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat	Lingk. I Palla'E & Lingk. II Lasalama, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	550000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
50	Jumriani	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Tidak Adanya Kontainer Sampah di TPS3R Baula Sayang	Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	800000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
51	Jumriani	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Kurangnya Alat Angkut Sampah di TPS3R Baula Sayang	Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	550000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
52	Hendri Saputra Iskandar	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Penambahan armada pengangkut sampah	Kelurahan Majjelling Wattang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	3	unit	550000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

53	DIAN MEGAWATI NUR	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	penambahan armada pengangkut sampah	Majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
54	Iwan Darmawan, SE	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Perlunya armada pengangkut sampah	PANGKAJENE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	2	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
55	Iwan Darmawan, SE	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Perlunya dilakukan pembersihan got dan dibawah jembatan sekitar Jl. A. Haseng dan Jl. Nene Mallomo	Pangkajene, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Paket	200000000	Penanganan sampah melalui pengangkutan
56	Muhammad Ali Safii	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Penambahan Armada Pengangkut Sampah	Desa Tanete, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
57	hasbi kadir	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	PENAMBAHAN ARMADA PENGANGKUT SAMPAH	DUSUN I DAN DUSUN II KANIE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

58	ANAS ALIMIE	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Perlunya Penambahan armada pengangkut sampah	Kelurahan Rijang Pittu , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
59	Ardiana agusra	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Penambahan armada pengangkut sampah	Kelurahan Lakessi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
60	Daryani T	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	PENAMBAHAN ARMADA PENGANGKUT SAMPAH	DUSUN SEREANG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
61	SURYADI ANDI	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Banyaknya sampah masyarakat menumpuk tidak terbuang	Dusun 1,2 dan 3, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
62	TRIYANA WINDA	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Penambahan armada pengangkut sampah	Lautang Benteng , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

63	Khairunnisa	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Tidak ketersediaan TPA sampah di desa Allakuang	Dusun 1 s/ 5, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
64	SURIYATI RESSANG	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Pengadaan Mobil Sampah	Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
65	KARTONO S Pd I	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	pengadaan Mobil/Motor pengangkut sampah	Desa Cenrana, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	600000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
66	ABDILLAH YASIN	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Masyarakat sering membuang sampah di pinggir jalan sehingga perlunya Pengadaan lahan pengelolaan sampah sementara di jalan poros Teteaji	Jalan Poros Amparita - Teteaji, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

67	MUHAMMAD AZIQIN	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	pengadaan tempat pengelolaan sampah dan motor pengangkut sampah	wanio, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	unit	650000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
68	A.MUH.ALIMUDIN	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	pengadaan Tempat pembuangan sampah dan pengadaan Motor pengangkut sampah	Desa Corawali, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	1	Unit	550000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

69	NURHAYATI	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Di beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng masih banyak sampah terkumpul ditempat yang tidak semestinya, akibat dari Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah, sehingga dibutuhkan Pengadaan Armada Sampah sebanyak 2 Unit, dengan perkiraan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-	Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	2	Unit	55000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
70	SULAEMAN MALLE	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pencemaran Lingkungan	Pengadaan Mobil Sampah 2 Unit di Kecamatan Pitu Riawa	Dusun III Cempa JawaE Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi TAPD	2	Unit	700000000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

71	HERWIN, S. IP., M. Si	Kurangrangnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (DPLH) Prioritas	pengadaan dump truk	kec. maritengngae dan panca rijang, Provinsi Sulawesi Selatan	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	-	-	-	-
72	HERWIN, S. IP., M. Si	Kurangrangnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (DPLH) Prioritas	dozer	kel arawa, Provinsi Sulawesi Selatan	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	-	-	-	-
73	HERWIN, S. IP., M. Si	Kurangrangnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (DPLH) Prioritas	kontainer sampah	tersebar di 16 tempat di kab. sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	-	-	-	-
74	HERWIN, S. IP., M. Si	Kurangrangnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (DPLH) Prioritas	pengadaan motor pengangkut sampah	tersebar di kab. sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	-	-	-	-
75	HERWIN, S. IP., M. Si	Kurangrangnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (DPLH) Prioritas	Bangunan gedung laboratorium	kec. Maritengngae, Provinsi Sulawesi Selatan	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	Verifi kasi TAPD	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026. Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting sebagai landasan awal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Berdasarkan visi dimaksud, Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang ini negara yang berdaulat dan berperan penting didunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas : (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi dan (iii) Transformasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dan (v) Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi yaitu (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta (viii) Kestinambungan Pembangunan. Pentahapan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dimaksud dilakukan secara terukur dan komsisten untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dilakukan melalui 4 tahap yaitu Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi, tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi, tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global dan tahap 4 (2040- 2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Sebagai penjabaran dari Tahap 1 RPJPN 2025-2045, dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) Sasaran Pembangunan Nasional Yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

a. Tujuan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing misi dan merupakan prioritas tertinggi misi tersebut, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan daerah secara keseluruhan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan adalah ***Meningkatkan Pengendalian Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup***

b. Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Rencana Kerja adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang telah spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan
2. Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

c. Indikator Renja Dinas Lingkungan Hidup

Indikator dari Dinas PSDA yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
5. Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
6. Predikat Nilai SAKIP

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)	71.71	71.91	72.11	72.31	72.51	72.51
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	78.22	78.52	78.82	79.12	79.42	79.42
			Indeks Kualitas Lahan	69.78	69.85	69.92	69.99	70.06	70.06
		Sasaran 1 : Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	20.4	20.7	21	21.3	21.6	22
		Sasaran 2 : Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	0,42	0,52	0,66	1,53	1,57	1,64
		Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program / kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2026 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, karena secara tidak langsung berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan strategis Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Alat Besar
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3

2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

1. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak yang terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

H. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

I. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

J. Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- Penanganan sampah melalui pengangkutan
- Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
- Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
- Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sesuai tabel T-C.33

TABEL T-C. 33									
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024									
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025									
Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG									
Lembar : 1 dari 6 Halaman									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Lingkungan								
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Sidenreng Rappang	100%	178.758.000	DAU		100%	178.758.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	100%	168.758.000	DAU		100%	168.758.000
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	168.758.000	DAU		2 Dokumen	168.758.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	100%	10.000.000	DAU		100%	10.000.000
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	5.000.000	DAU		2 Dokumen	5.000.000

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Kab. Sidenreng Rappang	13.44	100.000.000	DAU		13.44	100.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kab. Sidenreng Rappang	100%	75.000.000	DAU		100%	75.000.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	25.000.000	DAU		2 Dokumen	25.000.000
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks	Kab. Sidenreng Rappang	2 Lokasi	15.000.000	DAU		2 Lokasi	15.000.000
2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Paket	20.000.000	DAU		2 Paket	20.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	15.000.000	DAU		2 Dokumen	15.000.000

2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	100%	25.000.000	DAU		100%	25.000.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	10.000.000	DAU		12 Laporan	10.000.000
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Titik	15.000.000	DAU		12 Titik	15.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati yang lestari	Kab. Sidenreng Rappang	30%	1.780.000.000	DAU		30%	2.155.000.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Sidenreng Rappang	100%	1.780.000.000	DAU		100%	2.155.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	50 Ha	1.750.000.000	DAU		52 Ha	2.150.000.000
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten//kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	30.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000

2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Persentase Pengurangan Limbah B3	Kab. Sidenreng Rappang	100%	43.000.000	DAU		100%	43.000.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Sidenreng Rappang	100%	20.000.000	DAU		100%	20.000.000
2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Kab. Sidenreng Rappang	6 Usaha	20.000.000	DAU		6 Usaha	20.000.000
2.11.05.2..02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	100%	23.000.000	DAU		100%	23.000.000
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintahan Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	Kab. Sidenreng Rappang	6 Dokumen	23.000.000	DAU		6 Dokumen	23.000.000

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	100%	37.000.000	DAU		100%	37.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Kab. Sidenreng Rappang	100%	37.000.000	DAU		100%	37.000.000
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis persetujuan lingkup, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Kab. Sidenreng Rappang	7 Dokumen	10.000.000	DAU		7 Dokumen	10.000.000
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Sidenreng Rappang	35 Usaha	27.000.000	DAU		35 Usaha	27.000.000

2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Sidenreng Rappang	100%	10.000.000	DAU		100%	10.000.000
2.11..07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi tentang kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Sidenreng Rappang	100%	10.000.000	DAU		100	10.000.000
2.11.07.2.01.0001	Koodinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kab. Sidenreng Rappang	100%	37.000.000			100%	37.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	Kab. Sidenreng Rappang	100%	37.000.000	DAU		100	37.000.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat lembaga masyarakat dunia /usaha dunia/pendidikan /filantropi yang dunia kinerja dalam rangka PPLH	Kab. Sidenreng Rappang	8 Entitas	37.000.000	DAU		8 Entitas	37.000.000

2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Kab. Sidenreng Rappang	100%	15.000.000	DAU		100%	15.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kab. Sidenreng Rappang	100%	15.000.000	DAU		100%	15.000.000
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Kab. Sidenreng Rappang	10 Pengaduan	15.000.000	DAU		10 Pengaduan	15.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	47.65	10.257.194.000	DAU		47.65	7.189.942.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	10.257.194.000	DAU		100%	7.189.942.000
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	2 Kelompok	20.000.000	DAU		2 Kelompok	20.000.000

2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	4.442.252.000	DAU		2 Unit	1.300.000.000
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan diterapkan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	20.000.000	DAU		2 Dokumen	20.000.000
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kab. Sidenreng Rappang	27021 Ton	3.000.000.000	DAU		27021 Ton	3.000.000.000
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Kab. Sidenreng Rappang	88 Persen	10.000.000	DAU		88 Persen	10.000.000
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Sidenreng Rappang	9,260 Ton	1.779.942.000	DAU		9,260 Ton	1.779.942.000
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Sidenreng Rappang	7 Laporan	10.000.000	DAU		7 Laporan	10.000.000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Sidenreng Rappang	38,5 Ton	975.000.000	DAU		38,5 Ton	1.050.000.000

2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Sidenreng Rappang	100%	5.000.685.425	DAU		100%	5.029.264.411
2.11.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	35.200.000	DAU		100%	35.200.000
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	12.000.000	DAU		2 Dokumen	12.000.000
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.500.000	DAU		1 Dokumen	1.500.000
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	2.000.000	DAU		2 Dokumen	2.000.000
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.700.000			1 Dokumen	1.700.000
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	4.000.000	DAU		2 Dokumen	4.000.000
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Junlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lsporasi hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	11.000.000	DAU		2 Laporan	11.000.000
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	3.000.000	DAU		2 Laporan	3.000.000

2.11.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	3.964.975.425	DAU		100%	4.043.554.411
2.11.01.2.02.0003	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	560 Org/bln	3.941.775.425	DAU		560 Org/bln	4.020.354.411
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	1.500.000	DAU	12 Dokumen		1.500.000
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.000.000
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	7.700.000	DAU		1 Laporan	7.700.000
2.11.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumem	2.000.000	DAU		1 Dokumem	2.000.000
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Lapaoran keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	10.000.000	DAU		12 Laporan	10.000.000

2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	4.000.000	DAU		100%	4.000.000
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1	2.000.000
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	2.000.000	DAU		1	2.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	100%	203.500.000	DAU		100%	203.500.000
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	70 Paket	3.500.000	DAU		72 Paket	3.500.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	185 Laporan	200.000.000	DAU		185	200.000.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	45.000.000	DAU		100%	45.000.000
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	4.000.000	DAU		1 Unit	4.000.000
2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	1.000.000	DAU		1 Unit	1.000.000

2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	10 Unit	20.000.000	DAU		10 Unit	20.000.000
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4 Unit	20.000.000	DAU		4 Unit	20.000.000
2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dfisediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	DAU		0	0
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Kab. Sidenreng Rappang	100%	454.040.000	DAU		100%	454.040.000
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	500 Laporan	5.000.000	DAU		500 Laporan	5.000.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	74.040.000	DAU		12 Laporan	74.040.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	375.000.000	DAU		12 Laporan	375.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	293.970.000	DAU		100%	243.970.000
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	40.000.000	DAU		1 Unit	40.000.000

2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	75 Unit	133.970.000	DAU		75 Unit	133.970.000
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	30 Unit	5.000.000	DAU		30 Unit	5.000.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	76 Unit	15.000.000	DAU		76 Unit	15.000.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	100.000.000	DAU		1 Unit	50.000.000
	Total				17.458.637.425				14.794.964.411

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. **Pengelolaan sampah** : Selain mengelola sampah, DLH juga harus fokus pada pengurangan sampah di sumbernya (misalnya, melalui konsep 3R: reduce, reuse, recycle), serta pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat.
2. **Pengelolaan limbah B3** : Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memerlukan pengawasan ketat, termasuk inventarisasi dan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri dan fasilitas kesehatan
3. **Pengendalian pencemaran**: Terus memantau dan mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah. Ini termasuk penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan
4. **Pemantauan kualitas lingkungan**: Melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah) serta evaluasi hasil pemantauan.
5. **Pemeliharaan lingkungan**: Melaksanakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup, seperti penghijauan dan reboisasi.
6. **Edukasi dan sosialisasi**: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye lingkungan
7. **Kemitraan**: Membangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi untuk memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup
8. **Pelayanan publik**: Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait perizinan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk pencapaian visi dan misi tersebut di atas sangat ditentukan oleh faktor keberhasilan sebagai berikut :

1. Kerjasama yang baik oleh sumber daya manusia, lingkungan, baik petugas pelayanan publik, masyarakat dan pelaku usaha
2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, terutama di tingkat lapangan
3. Kesigapan tenaga teknis di bidang lingkungan hidup untuk menangkal dampak kerusakan lingkungan hidup
4. Tersedianya sarana pendukung dan ala-alat kantor yang memadai

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2026 merupakan acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan :

1. Seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengimplementasikan Renja ini dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Keberhasilan sektor lingkungan hidup harus didukung oleh sektor-sektor lain yang terkait dan didukung oleh pendanaan yang memadai.
3. Rencana kerja ini merupakan langkah awal dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Perlu didasari bahwa keberhasilan di bidang lingkungan hidup tergantung dari partisipasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam implementasi renja ini diharapkan partisipasi yang lebih aktif dan luas dari seluruh masyarakat.
5. Setiap kegiatan yang dilaksanakan difokuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam OPD, sebagai sasaran program pada akhir tahun perlu dilakukan evaluasi dan analisis tentang apa yang telah dicapai maupun yang belum tercapai sebagai bahan untuk menyusun program berikutnya.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

. Pangkajene Sidenreng,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng
Pangkat : Pembina
Nip 19810611 200003 1 002